



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 11384-11390

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Doktrin Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Nining Suryaningsih¹, Sitti Maryam^{2✉}

Universitas Patempo

Email: sitti.patajai@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Mahasiswa selaku insan akademik perlu dibekali doktrin kewarganegaraan berintikan penanaman idiologi Pancasila dan UUD 45, karena keduanya merupakan nilai fundamental atau norma dasar bangsa Indonesia. Di samping itu, sehingga perlu dipertautkan dengan berbagai keaneka ragaman sosial budaya guna mendukung aktifitas mewujudkan bhinneka tunggal ika. Hal ini, berguna untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan rasa patriotisme kebangsaan Indonesia. Jurnal ilmiah ini ditulis secara kualitatif (*quatitative methode*), sedang proses penyimpulan bahan kajian bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundangan. Pendidikan Kurikulum kewarganegaraan yang diajarkan pada perguruan tinggi, disusun secara sentralistik oleh pemerintah, agar dapat menunjang kelancaran proses belajar-mengajar, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa memahami doktrin nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.

Kata Kunci: *Doktrin Kewarganegaraan*

Abstract

Students as academic people need to be equipped with the doctrine of citizenship based on the cultivation of Pancasila ideology and The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as both are fundamental values or basic norms of the Indonesian nation. In addition, it is necessary to link it with various social and cultural diversity in order to support the activities of realizing the national motto "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). This is useful to awaken the spirit of nationalism and the sense of patriotism of the Indonesian nationality. This scientific journal is written qualitatively (qualitative method) and the process of summarizing the research materials is sourced from books, scientific journals and legislative regulations. The civics curriculum taught at the university is centrally prepared by the government in order to support the smooth learning and teaching process in the hope of improving the quality of students understanding the doctrines of nationalism and Indonesian nationality.

Keywords: *Citizenship Doctrine*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya konsep ketatanegaraan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang berorientasi pada masalah kewarganegaraan, kependudukan dan pemerintahan. Oleh karena itu, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam konsep kewarganegaraan senantiasa berhubungan dengan eksistensi rakyat (penduduk/warga Negara) sebagai subyek yang diperintah dan pemerintah sebagai pemegang otorita pemerintahan. Hal ini bersinergi dengan pandangan Abdul Aziz Wahab (2011 : 106-107), mendalilkan bahwa kewarganegaraan dimana ada pemerintah disitu ada rakyat. Juga bersesuaian dengan pandangan Cicero (Syamsuddin Pasamai, 2013 : 48) mengungkapkan bahwa *Ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).

Di samping itu, Sunarto dan kawan-kawan (2019 : 2) antara lain mengungkapkan bahwa ada pihak yang mengidentikkan manusia sebagai mahluk yang berfikir (*homo sapien*), mahluk yang berbentuk (*homo faber*), mahluk yang dapat dididik (*homo educandum*). Kemudian untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, maka perlu dibekali dengan pendidikan. Sedang pengajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai aktivitas pendidikan yang berorientasi membentuk watak dan karakter peserta didik termasuk mahasiswa selaku insan akademik atau masyarakat ilmiah, memiliki rasa nasionalisme kebangsaan.

Salah satu upaya pemerintah memberikan doktrinalisasi kewarganegaraan terhadap warga negara, dengan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan berkenaan

dengan pendidikan kewarganegaraan, bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian, maka Peneliti memerlukan suatu metode yang dipergunakan memperoleh bahan atau data yang akan diperlukan dalam memecahkan suatu permasalahan. Hal ini sejalan diungkapkan Suriasumantri (Lijan Poltak Sinambela 2014 : 3), bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan hati-hati dan cerdas untuk memperoleh berbagai data guna memecahkan permasalahan yang ditetapkan. Kemudian metode merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Sedang metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dalam penulisan jurnal ini dipergunakan metode penelitian secara kualitatif (*quatitative methode*), selanjutnya dalam proses penyimpulan bahan kajian bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan doktrin kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori

1. Doktrin

Dalam Kamus Bahasa Umum Indonesia kata doktrin artinya ajaran (terutama yg diajarkan sebagai kepercayaan atas asas dl keagamaan, ketatanegaraan atau berupa ilmu pengetahuan); mis-*Karl Marx*. Doktrin yang dipandang suatu ajaran ketatanegaraan dijabarkan dalam berbagai perundang-undangan dijadikan sebagai landasan yuridis untuk mengatur Negara dan warga Negara. Kewarganegaraan satu doktrin kenegaraan yang diajarkan pada peserta didik termasuk mahasiswa selaku insan akademik, berguna untuk memperikan suatu pemahaman terhadap nasionalisme kebangsaan Indonesia.

2. Kewarganegaraan

Secara etimologi pengertian kewarganegaraan berarti keanggotaan dari sesuatu negara yang lebih bersifat kepada hak dan kewajiban warga negara (Poerwadarminta, W.J.S., 2001). Masalah kewarganegaraan hal ini terkait dengan hal ilwal yang berhubungan dengan warga Negara dari suatu Negara, dimana setipa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang dijamin dan dilindungi secara konstitusional oleh Negara. Kemudian dari segi bahasa kata kewarganegaraan berasal dari kata warga

Negara yang berarti yang berarti anggota daripada rakyat sesuatu Negara; yaitu penduduk, bias juga orang asing yang menurut undang-undang sudah masuk menjadi warga Negara. Sitti Maryam, dkk (2022 :9-10).

3. Mahasiswa

Mahasiswa selaku insan akademik tentunya telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajatnya, telah berusia 18 sampai 30 tahun dan dinyatakan lulus masuk dan terdaftar pada perguruan tinggi dengan mengambil jurusan yang disenangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia; mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah insan perguruan tinggi yang yang intelektual dan disiapkan menjadi pemimpin masa mendatang, serta memiliki cakrawala berfikir yang rasional. Sitti Maryam, dkk (2020 :1).

Doktrin Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Bahwa doktrin diidentikan idiologi, Sedang secara harfiah idiologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*science of ideas*) atau ajaran tentang pengertian – pengertian dasar. Atau dengan kata lain, bahwa idiologi ilmu yang membicarakan tentang sesuatu gagasan atau pemikiran untuk menjadikan pedoman dasar, landasan, prinsip dan cita-cita dalam hidup. Selanjutnya kewarganegaraan nasional diperkuat oleh bahasa dan kebijakan tentang kebudayaan yang mengesahkan budaya nasional melalui satu bahasa persatuan. Kedudukan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa sangat penting eksistensi kewarganegaraan dan pencapaian kesatuan identitas nasional.

Kemudian guna mewujudkan doktrin atau idiologi bangsa bagi warga negara diperlukan suatu kesatuan identitas, perlu ditanamkan sejak dini melalui pengajaran atau pendidikan. Ki Hajar Dewantara (Farida Sekti Pahlevi. 2017) mengungkapkan, bahwa pengertian pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang setinggi-tingginya.

Dalam menghadapi era globalisasi, perkembangan ilmu dan teknologi, keberadaan pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menanamkan idiologi, terutama mahasiswa yang menjadi penentu kelanjutan bangsa dan Negara. Beraneka ragam idiologi dan gaya hidup yang mudah ditonton, dilihat dan ditiru, sehingga perlu ada suatu penyaring, sehingga idiologi bangsa Indonesia, tidak terpengaruh dengan idiologi bangsa lain yang secara nyata bertentangan dengan idiologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu

pemerintah tampil untuk memberikan arahan atau kompas bagi mahasiswa untuk membentuk watak dan karakter intelektual yang memiliki semangat nasionalisme.

Seiring berkembangnya waktu dan pesatnya IPTEK, kecenderungan perilaku warga Negara ada dua yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga Negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun Negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga Negara. Oleh karena itu kurikulum Pkn termasuk materi, metode dan system evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan Iptek. Direktur Pembelajaran (2016 : 19-22). Sedangkan Said Gunawan (2019 : 203) mengungkapkan, bahwa Negara perlu memberikan suatu perhatian serius di sektor teknologi kata kunci yakni pengembangan teknologi ialah penguatan pada aspek *techne* (keterampilan) dan *logos* (ilmu).

Menurut Abdul Aziz Wahab (2011) bahwa prinsip pembelajaran bagi warga Negara telah disusun sedemikian rupa sehingga dengan mempelajari dan dengan membahas bahan-bahan pelajaran tersebut diharapkan pengetahuan dan perilaku mahasiswa telah terbentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak penguasa/pemerintah yang secara legitimate dalam hal ini adalah Negara. Bahan-bahan tersebut diambil dan disusun dari berbagai sumber formal (undang-Undang Dasar, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya) yang ditetapkan oleh Negara dalam upaya mempertahankan kekuasaan politik pemerintah. Bahan-bahan pelajaran tersebut secara singkat disebut doktrin politik, ekonomi social dan budaya. Untuk memudahkan pencapaiannya materi pelajaran disampaikan secara indoktrinatif pula dan fungsi serta peran guru adalah sebagai "juru bicara" atau "corong" pemerintah.

Bahwa salah satu upaya pemerintah untuk menentukan arah dan cita-cita bangsa terhadap warga Negara, maka pemerintah membuat kurikulum yang ditetapkan secara sentralistik, bahan-bahan kurikulum digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengajaran bagi dosen, guna menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme bagi mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa sebagai generasi intelektual yang berpancasilais, perlu berupaya membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sunaryati Harono (2011 : 273) mengungkapkan, bahwa Pancasila yang berisi nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia, sebenarnya berkedudukan juga sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.

Febriyantika Wulandari (2022) ditulis dalam jurnal ilmiahnya mengungkapkan, bahwa pada jenjang perguruan tinggi Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertujuan

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa, namun mengembangkan *softskill* serta karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja. Namun banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi, salah satunya kejenuhan mahasiswa menghadapi materi pendidikan kewarganegaraan yang dianggap sudah pernah didapatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

SIMPULAN

Pada hakekatnya kewarganegara di ajarkan pada perguruan tinggi merupakan mata kuliah dasar umum, dan tergolong salah satu pendidikan pengembangan kepribadian. Pengajaran Pendidikan kewarganegaraan dibuat secara sentralistik oleh pemerintah melalui beberapa regulasi antara lain; Keputusan Dirjendikti menetapkan, bahwa pengajaran kewarganegaraan diberikan kepada semua peserta didik di sekolah termasuk mahasiswa pada perguruan tinggi. Adapun kurikulum pengajaran dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, merupakan suatu doktrin kewarganeraan yang berguna menanamkan semangat integritas, pengetahuan, kepribadian dan keahlian, berintikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai idiologi dan falsafah bangsa, UUD 45 sebagai konstitusi Negara, NKRI sebagai keasatuan wilayah toritorial Indonesia dan keanekaragaman sosial dan budaya yang berbhinneka tunggal ika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab,dkk. 2011. Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta, Bandung. Hal. 6-7.
- Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Prima Media, Surabaya. H. 367
- Direktur Jenderal, 2016. Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Hal. 20-22.
- Kaelan, 2010. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta. Hal. 28
- Lijan Poltak Sinambela, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhmidayeli, 2013. Filsafat Pendidikan. Refika Aditama, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia1. Balai Pustaka
- Subiakto Tjakrawedaja, dkk, 2011 Sistem Ekonomi Pancasila, Rajawali Pres, Depok.Hal.55.
- Sitti Maryam,dkk; 2022, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN). Ardha Group, Gowa. Hal. 9-10, 17
- Sitti Maryam, dkk, 2020. Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Tallasa Media, Gowa. Hal.1.

- Suwarno, P.J., 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Kanisius, Yogyakarta.
- Sunarto, dkk. 1995. Perkembangan Peserta Didik, Rineka Cipt, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2011. Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT Citra Adhitya Bakti, Bandung. Hal. 273
- Sumarsono dkk.2002. Pendidikan Kewarganegaraan. PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai, 2013. Sejarah Sejarah Hukum (Dalam Prespektif Ilmu Hukum), Arus Timu, Makassar.
- Jurnal :
- Farida Sekti Pahlevi, 2017.Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia, Ebzies, Pendidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Volume 2 Nomor 1 <https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26>
- Febriyantika Wulandari. Dkk, 2022. Penerapan Praktek Kenegaraan Untuk Mengembangkan Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2 Desember 2022 e-ISSN: 2580-0086.
- Mustaqim, dkk, 2022. Respon Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring Pada Matakuliah Volume 2, Issue 1, 2022 (Reviewfile:///C:/Users/Asus/Downloads/195-Article%20Text-674-1-10-20220831.pdf).
- Sitti Maryam, dkk, 2024. Sumbangsi Universitas Patompo Memberantas Korupsi . Journal Of Social Science Research, Volume 4-E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>).
- , dkk. 2020. Diskusi Mahasiswa STKIP-PI MAKASSAR Terhadap Status Kewarganegaraan Djoko Sugiarto Tjandra, Mega Rezeki, Makassar.